

TESIS
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

THE IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND INVESTMENT ON
POVERTY IN GORONTALO PROVINCE

Disusun dan diajukan oleh:

Hairialsah Malapu

A032191001



PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO**

***(THE IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND INVESTMENT ON
POVERTY IN GORONTALO PROVINCE)***

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**

Disusun dan diajukan oleh

HAIRIALSAH MALAPU

A032191001

Kepada

PROGRAM MAGISTER

EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

TESIS

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

Disusun dan diajukan oleh

HAIRIALSAH MALAPU
A032191001

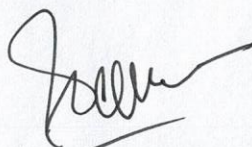
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **17 April 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



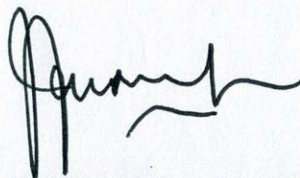
Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP. 19660717 199103 2 001

Pembimbing Pendamping,



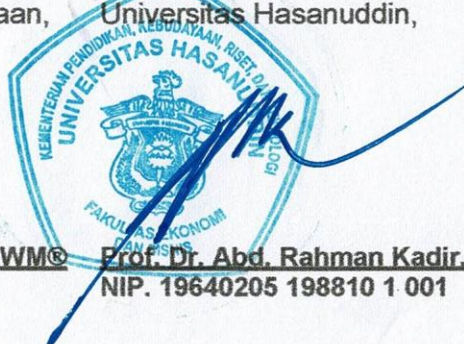
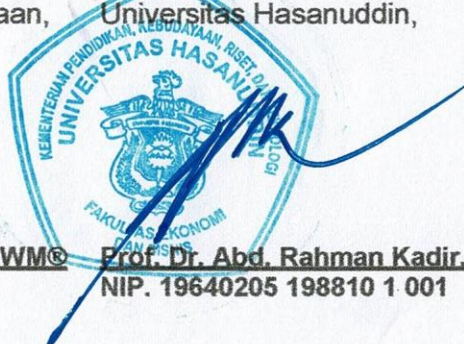
Dr. Agus Salim, SE., M.Si.
NIP. 19670817 199103 1 006

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,



Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA., CWM©
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hairialsah Malapu

Nim : A032191001

Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Jenjang : Strata Dua (S2)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

apabila dikemudian hari ternyata naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Juni 2023



Hairialsah Malapu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan selesainya tesis ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-NYA pada setiap langkah dan hembusan nafas kita semua.

Motivasi yang melatar-belakangi tajuk penelitian ini timbul karena ada kegelisahan penulis terhadap masalah kemiskinan yang begitu pelik di Provinsi Gorontalo. Tesis ini berjudul PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO, tesis ini memberikan sedikit gambaran tentang persoalan kemiskinan Gorontalo, yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan akademisi, dan pemangku kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi tingkat Strata Dua (S-2) di Pasca Sarjana FEB Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nursini, SE.,M.A selaku pembimbing utama yang begitu banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini
2. Dr. Agussalim, SE.,M.Si. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
3. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A.,Ph.D dan Dr. Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si Serta Dr. Sultan Suhab. SE.,M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik demi kebaikan tesis ini.
4. Dr. Indraswati Triabdi Reviane SE.,M.A CWM selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan yang senantiasa menyediakan pelayanan dan pengarahan mulai dari awal sampai dengan akhir masa perkuliahan.

5. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM selaku Dekan, Serta Para Wakil Dekan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menciptakan suasana belajar senyaman mungkin.
6. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang selalu berupaya menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan yang telah berdedikasi memberikan pengajaran dan pencerahan pengetahuan serta berbagi pengalaman hidup kepada penulis.
8. Ibu Ifah dan jajaran staf akademik Pasca Sarjana MEPP yang senantiasa membantu penulis baik dalam pengurusan administrasi hingga motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. drg. Andi Furqan Bastian, Syamsu Alam, S.Si.,M.Si, Dr. Funco Tanipu, S.T.,M.A teman seperantaun asrama putra KKIG Makassar/HPMIG Makassar yang telah mendukung secara moril dan materil, serta teman Teman-teman kelas angkatan 2019 yang telah menjadi keluarga baru dan memberikan semangat serta kenangan selama masa perkuliahan berlangsung di Unhas.

Teristimewa penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syahrin Malapu, S.Pd.,M.M dan Ibunda tersayang Satriati Y. Pipi, S.Pd serta adik terkasih Mohammad Qudrat Malapu S.H.,M.H, dan semua keluarga besar Malapu dan Pipi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, kasih sayang, doa, nasihat, dan motivasi kepada penulis.

Demikian penulis sampaikan, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT, akhir kata penulis sampaikan banyak terima kasih.

Makassar, Juni 2023

Hairialsah Malapu

ABSTRACT

HAIRIALSAH MALAPU. *The Effect of Government Spending and Investment on Poverty in Gorontalo Province* (supervised Nursini and Agussalim)

This study aims to analyze the effect of capital expenditure, personnel expenditure, and investment on poverty in Gorontalo. The analysis was carried out using time series data in Gorontalo in the 2007-2022 period. The data used in this study were secondary data obtained from the Statistic Centre Bureau (BPS) of Gorontalo and supported by other sources. The results of the study show that capital expenditure has no direct or indirect effect on poverty; personnel expenditure has an indirect effect through employment, and investment does not have an indirect effect on poverty through economic growth and employment absorption.

Keywords: poverty, government spending, investment



ABSTRAK

HAIRIALSAH MALAPU. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo* (dibimbing oleh Nursini dan Agussalim).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja modal, belanja pegawai, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Analisis dilakukan melalui data deret waktu di Provinsi Gorontalo pada periode 2007-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan didukung oleh sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung; belanja pegawai berpengaruh secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja; dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: kemiskinan, pengeluaran pemerintah, investasi



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRACT | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Kemiskinan..... | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Kemiskinan..... | 11 |
| 2.1.2 Teori Kemiskinan..... | 13 |
| 2.1.3 Penyebab Kemiskinan..... | 14 |
| 2.1.4 Indikator kemiskinan..... | 16 |
| 2.1.5 Tingkat Kemiskinan..... | 18 |
| 2.1.6 Strategi Pengentasan Kemiskinan..... | 18 |
| 2.2 Hubungan Antar variabel..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kemiskinan..... | 21 |
| 2.2.2 Hubungan Investasi dan Kemiskinan..... | 22 |
| 2.3 Kajian Empiris..... | 25 |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS..... | 30 |
| 3.1 Kerangka Konseptual..... | 30 |
| 3.2 Hipotesis..... | 32 |
| BAB IV METODE PENELITIAN..... | 34 |
| 4.1 Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| 4.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| 4.3 Jenis dan Sumber data..... | 34 |
| 4.4 Metode Dan Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 4.5 Definisi Operasional..... | 35 |
| 4.6 Metode Analisis Data..... | 36 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| 5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 40 |
| 5.1.1 Keadaan Geografi..... | 40 |
| 5.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi..... | 41 |
| 5.1.3 Kondisi Demografi..... | 42 |
| 5.2 Deskripsi Data Penelitian..... | 42 |
| 5.2.1 Gambaran Kemiskinan Provinsi Gorontalo..... | 43 |
| 5.2.2 Gambaran Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Gorontalo..... | 50 |
| 5.2.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo..... | 52 |
| 5.2.4 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo..... | 54 |
| 5.2.5 Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo..... | 56 |
| 5.2.6 Gambaran Perkembangan Investasi Di Provinsi Gorontalo..... | 58 |
| 5.3 Hasil Analisis Penelitian..... | 61 |

| | |
|---|-----------|
| 5.4 Pembahasan Penelitian..... | 65 |
| 5.4.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo..... | 65 |
| 5.4.2 Pengaruh Tidak Langsung Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Melalui Pertumbuhan Ekonomi..... | 66 |
| 5.4.3 Pengaruh Tidak Langsung Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Melalui Penyerapan Tenaga Kerja..... | 67 |
| 5.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Belanja Pegawai Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Melalui Penyerapan Tenaga Kerja..... | 70 |
| 5.4.5 Pengaruh Tidak Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Melalui Pertumbuhan Ekonomi..... | 71 |
| 5.4.6 Pengaruh Tidak Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Melalui Penyerapan Tenaga Kerja..... | 72 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 74 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 74 |
| 6.2 Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |
| LAMPIRAN HASIL ANALISIS..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 2.1 Karakteristik Rumah Tangga Miskin Menurut BPS | 17 |
| 5.1 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2016- 2020..... | 42 |
| 5.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo..... | 46 |
| 5.3 Daftar komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan beserta kontribusinya..... | 48 |
| 5.4 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... | 52 |
| 5.5 Pengaruh Langsung Variabel Independen Ke Variabel Dependen..... | 63 |
| 5.6 Pengaruh Tidak Langsung Variabel Independen Ke Variabel Dependen..... | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo | |
| Tahun 2010-2020..... | 3 |
| 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | |
| Perkembangan Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2019..... | 4 |
| 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Dari Tiga Prespektif (1) Permintaan (2) | |
| Penawaran (3) SDA & SDM..... | 13 |
| 3.1 Kerangka Pemikiran..... | 32 |
| 5.1 Peta Provinsi Gorontalo..... | 40 |
| 5.2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Gorontalo..... | 41 |
| 5.3 Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo..... | 45 |
| 5.4 Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo..... | 51 |
| 5.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo | 54 |
| 5.6 Realisasi Pendapatan Dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo..... | 55 |
| 5.7 Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo..... | 57 |
| 5.8 Investasi Provinsi Gorontalo..... | 60 |
| 5.9 Rincian Komoditas Provinsi Gorontalo..... | 61 |
| 5.10 Diagram <i>Path Analysis</i> | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia yang sukar dipecahkan, dikarenakan dimensi kemiskinan telah melebar pada aspek yang lain, dari masalah yang awalnya unidimensi kini berkembang menjadi masalah multidimensi. Menurut Bank Dunia (2000), *“poverty is pronounced deprivation in well-being”*, dimana kesejahteraan dapat diukur oleh kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, asset, perumahan, dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan dalam berbicara, juga kemiskinan merupakan kurangnya kesempatan/peluang, ketidakberdayaan dan kerentanan.

Dengan gambaran di atas, jelas bahwa kemiskinan benar-benar merupakan masalah multidimensional yang memerlukan kebijakan dan program intervensi multidimensi pula untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan membuatnya terbebas dari kemiskinan.

Secara sederhana, kemiskinan sendiri bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta tidak dapat mengakses pendidikan, dan kesehatan (BPS 2022).

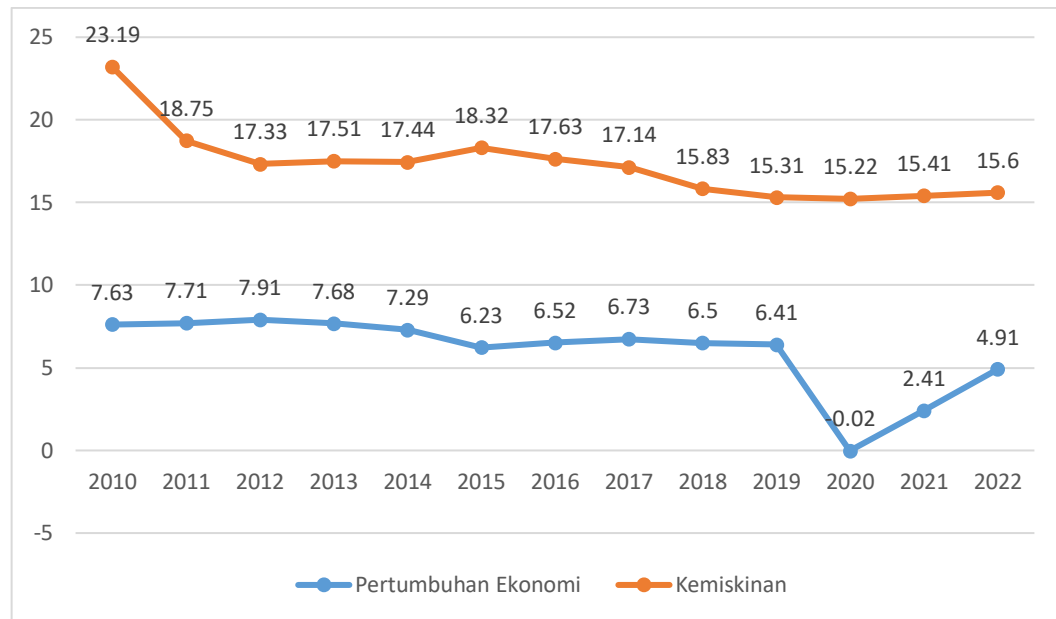
Menurut Todaro dan Smith (2015), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: (1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat; (2) Pendapatan perkapita masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat; (3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata; (4) Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut; (5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya

wabah penyakit; (6) Fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai, disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka kesempatan untuk orang miskin ke luar dari lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang secara persentase masih di atas nasional dan berada pada posisi ke-5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi seluruh provinsi di Indonesia (BPS 2022). kemiskinan di Gorontalo terjadi lonjakan secara persentase dan jumlah penduduk miskin dalam 2 tahun terakhir.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September 2020 sebesar 15,22 persen, atau menurun 0,21 persen dibandingkan Maret 2019, dan kemudian di tahun selanjutnya , jumlah penduduk miskin September 2019 sebanyak 184,710 ribu jiwa, berkurang 1,32 ribu jiwa dibanding posisi Maret 2019, dan berkurang 3,59 ribu jiwa dibanding September 2018 sebanyak 188,30 ribu jiwa.

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebesar 185,44 ribu orang, naik 0,84 ribu orang terhadap bulan September 2021 dan menurun 0,85 ribu orang terhadap bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 3,97 persen, menurun 0,09 persen poin dari kondisi bulan September 2021 yang tercatat sebesar 4,06 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2022

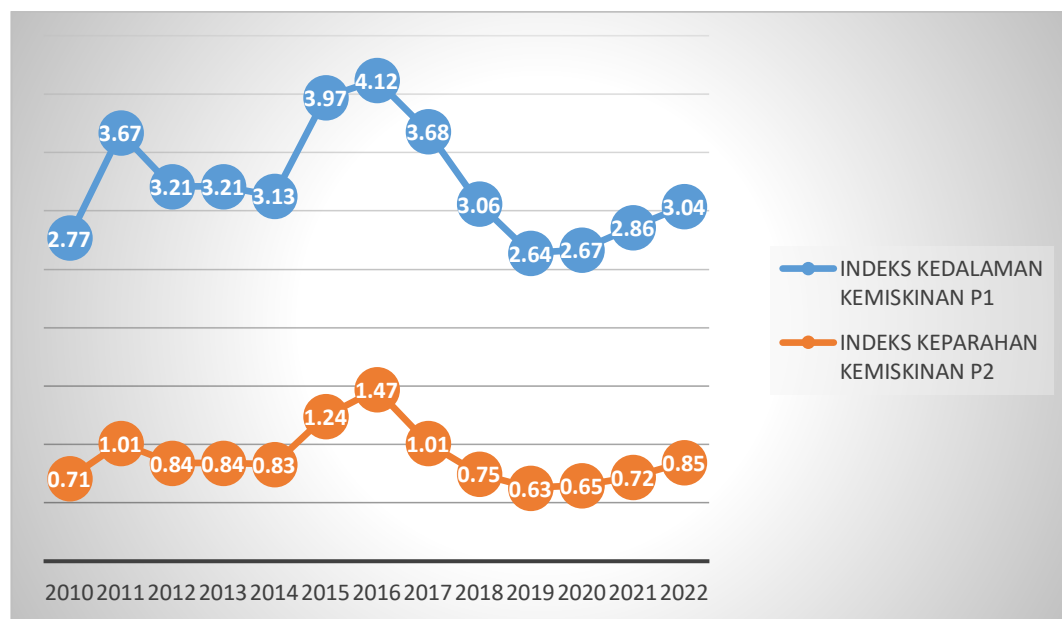
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Presentase Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo, 2010-2022.

Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan ditingkat kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo dibuktikan melalui aktivitas pembangunan daerah. Pembangunan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi berjalan dan mengalami perubahan perputaran ke arah yang lebih baik dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2022 tentang fokus utama program pengentasan kemiskinan melalui 14 program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

Persoalan kemiskinan tidak sebatas melihat jumlah dan persentase penduduk, dimensi yang lain pun harus diperhatikan seperti faktor kedalaman kemiskinan (*proverty gap index-p1*) dan keparahan kemiskinan (*proverty secerity index-p1*). Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selain mereduksi jumlah

penduduk miskin tetapi juga harus mengatasi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada tahun 2016 peningkatan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 4,12 persen yang di tahun sebelumnya berada pada 3,97 persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan tingginya indeks keparahan kemiskinan Provinsi Gorontalo ditahun yang sama 1,47 persen dari tahun sebelumnya 1,24 persen, di tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 3,04 persen meningkat 0,18 persen dari tahun sebelumnya 2021 yang sebesar 2,86 persen, sementara untuk indeks keparahan kemiskinan di tahun 2022 sebesar 0,85 persen angka ini meningkat 0,13 persen dari kondisi tahun sebelumnya 2021 yang sebesar 0,72 persen. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (*gap*) pengeluaran antar sesama penduduk miskin itu bergerak fluktuatif.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2022

Gambar 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo tahun 2010-2022

Provinsi Gorontalo merupakan pusat perekonomian dan titik pertumbuhan (*growth point*) yang seluruh kegiatan perekonomiannya akan mempengaruhi aktivitas perekonomian di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu di antara banyak indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan *Output* dalam suatu perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo termasuk pertumbuhan yang dalam kategori baik. Sebab angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selalu berada di atas perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di tahun 2019 sebesar 6,41 persen. Pada 2020 pertumbuhan ekonomi global diterpa pandemi yang berimbas pada pertumbuhan yang minus di semua wilayah dan pada saat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka -0,02 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo sebesar -2,07 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara bertahap berangsur pulih dan meningkat sebesar 2,41 persen di tahun 2021 dan sebesar 4,91 persen di tahun 2022.

Aspek pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) termasuk salah satu aspek dari penggunaan sumberdaya ekonomi secara langsung yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat, untuk mendorong perubahan ekonomi kearah yang lebih baik dan bersifat terus menerus (*continue*), maka perlu peranan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber-sumber pembangunan dan penggalian sumber-sumber potensi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Untuk keperluan tersebut, maka peranan pengeluaran pemerintah sebagai alat pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut haruslah disusun secara cermat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo dapat ditekan melalui pengeluaran pemerintah di bidang belanja modal dan investasi. Hal ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Wagner ditahun (1855), Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam Masyarakat, Hukum, Pendidikan, Rekreasi, Kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesebroto, 2001).

Teori dari Wagner didukung oleh Penelitian Seyi Saint Akadiri (2017), "*Public Expenditures and Economic Growth: Was Wagner Right? Evidence from Turkey*", hasil penelitian yang dikemukakan oleh Seyi Saint Akadiri bahwa pengeluaran pemerintah menunjukkan hubungan jangka panjang, antara variabel investasi dan transfer terhadap pertumbuhan, sedangkan belanja publik, menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data realisasi pengeluaran pemerintah daerah Gorontalo yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan belanja pada periode 2017-2022. Belanja pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2017 sebesar Rp 1,804 miliar dan pada tahun 2022 terjadi lonjakan belanja pemerintah daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 5,468 triliun dikarenakan adanya proyek strategis nasional.

Pada komponen belanja modal pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami stagnasi pada periode 2018-2019 sebesar Rp280 miliar dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 46% menjadi Rp523 miliar, dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp 404 miliar di tahun 2022. Belanja pegawai Provinsi Gorontalo secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 Rp 648,8 miliar dan meningkat menjadi Rp 749,3 miliar di tahun 2020 atau meningkat sebesar 15% dan mengalami penurunan di tahun berikutnya pada tahun 2021 sebesar Rp 646,5 miliar, hal ini didorong oleh instruksi pemerintah pusat melalui kementerian keuangan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran.

Selain faktor pengeluaran pemerintah, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah. Barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu yang pada akhirnya dihitung ke dalam Produk Domestik Regional Brutto (PRDB) yang seyogianya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia yang tersedia (*available*). Apabila aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan baik, pada akhirnya berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menekan tingkat pengangguran dan dalam jangka panjang meningkatkan kesejahteraan (Helen dkk 2017).

Kebijakan mengenai perluasan kesempatan kerja merupakan hal penting di suatu daerah, karena dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dilihat dari data yang ada, tenaga kerja di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2017-2022 di mana pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja mencapai 599.147 jiwa, atau meningkat sebanyak 43.164 jiwa dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 yang sebanyak 555.533 jiwa.

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, akan meningkatkan *output* barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya, Ruranga, & Kaberuka, 2012).

Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, akan tetapi kemiskinan di Gorontalo belum mampu keluar dari 5 provinsi dengan persentase kemiskinan terbesar se-Indonesia yakni Provinsi Papua 26.08%, Papua Barat 21.43%, Nusa Tenggara Timur 20.23%, Maluku 16.23%, dan Provinsi Gorontalo 15.60% (BPS 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor belanja modal, belanja pegawai dan investasi terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo. melalui variabel antara yakni pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja, di Provinsi Gorontalo.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan dan pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
2. Bagaimana belanja pegawai terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kemiskinan, melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung belanja modal, terhadap kemiskinan dan pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung belanja pegawai, terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo, melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan kepada pemerintah setempat, dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan investasi.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi, bagi para peneliti berikutnya, yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan ke dalam enam bab sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pendahuluan menguraikan latar belakang, yang menjelaskan fenomena serta alasan sehingga penelitian ini dilakukan. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dan tujuan penelitian diuraikan. Setelah itu manfaat penelitian

juga dicantumkan sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Sistematika penulisan menjadi bagian akhir dari uraian bab pertama.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori, konsep, serta kajian empiris. Kajian teori dan konsep menjelaskan teori yang mendasari penelitian dan kajian empiris yang sangat relevan dengan topik penelitian.

Bab ketiga adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Konsep penelitian sebagai kerangka pemikiran dan hipotesis (dugaan sementara).

Bab keempat adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Bab ini merupakan proses dari menganalisis data penelitian yang telah dihimpun dari berbagai macam sumber dan merupakan inti dari tesis yang membahas pengaruh belanja modal, belanja pegawai, dan investasi terhadap kemiskinan baik secara langsung dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo pada periode penelitian tahun (2007-2022).

Bab keenam adalah kesimpulan dan saran yang berisi cakupan kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Kemiskinan

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Secara Etimologi kemiskinan berasal dari kata miskin, yaitu tidak berharta benda atau serba kurang, sedangkan kemiskinan secara Terminologi menurut Soerjono Soekanto menerangkan kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), kemiskinan merupakan kekurangan dalam kesejahteraan, yang terdiri dari banyak dimensi. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan adalah keadaan individu yang mempunyai rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Amartya Sen menjelaskan kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (*unfreedomness*). Dalam artian sederhana walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi.

Ravallion dalam Barika (2013) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal dan bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan

anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Banyak metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Demikian juga dengan lembaga-lembaga asing. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep garis kemiskinan atau *poverty line*, metode pengukuran angka kemiskinan harus konsisten untuk menghasilkan data jumlah penduduk miskin dengan lebih tepat data inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pengentasan kemiskinan. Pengukuran angka kemiskinan yang dilakukan Badan Pusat Statistik adalah dengan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan makanan. Perhitungan garis kemiskinan dapat dinyatakan dengan.

$GK = GKM + GNKM$ dimana: GK = Garis Kemiskinan. GKM = Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per orang per hari dan GKNM = Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pada dasarnya konsep untuk mengukur kemiskinan. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

BKKBN mempunyai kriteria kemiskinan tersendiri, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada lima indikator dasar dalam penafsiran kemiskinan. (1) Semua anggota keluarga menjalankan kewajiban agamanya; (2) Semua anggota keluarga mampu untuk makan setidaknya dua kali sehari; (3) Semua anggota keluarga memiliki pakaian yang

berbeda untuk di rumah, bekerja, bersekolah dan bepergian; (4) Sebagian besar lantai rumah bukan tanah; (5) Keluarga mampu mendapatkan pengobatan modern jika sakit.

2.1.2 Teori Kemiskinan

a. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Teori yang dikemukakan Ragnar Nurkse (1953), serta teori Pendekatan Sumber Daya dan Hak (*Endowment and Entitlement Approach*) yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1981).



Sumber : <https://studiekonomi.com/ekonomi/pembangunan/lingkaran-setan-kemiskinan/>
(diakses 2022)

Gambar 2.1 Gambar lingkaran setan kemiskinan dari tiga perspektif (1) Permintaan (2) Penawaran (3) SDA & SDM.

Ada sebuah ungkapan kuno yang diungkapkan Nurkse dalam *Problems of Capital Formation in underdeveloped countries* bahwa suatu negara miskin karena ia miskin. Lingkaran setan kemiskinan ini bila dilihat dari sisi permintaan nampak pada aliran lingkaran kemiskinan bergaris merah.

b. kebijakan yang memihak orang miskin (*pro poor budgeting*)

Pro Poor Budget adalah sebagai bentuk reformasi anggaran yang ditujukan untuk masyarakat miskin, agar hak-hak dasarnya terjamin. Asal mula *pro poor budget* disebabkan karena masih banyak masyarakat kurang mampu secara ekonomi (miskin) yang tidak mendapatkan hak untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kebutuhan dasar mereka sering tidak terpenuhi, hak dasar mereka yang paling utama adalah kesehatan, karena kesehatan mempunyai keterikatan hubungan yang saling kait mengkait, dimana kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap pelbagai macam penyakit sedangkan kesehatan mempengaruhi kemiskinan, masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat produktivitas kerjanya tinggi.

Secara konseptual anggaran dijabarkan dalam tiga poin sebagai berikut : (a) *Pro Poor Pro Policies*: Kebijakan pembangunan yang berpihak pada si miskin; (b) *People oriented* anggaran yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar dasar; (c) Kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

2.1.3 Penyebab kemiskinan

Secara umum kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi yaitu kondisi alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin, itulah

sebabnya banyak pakar ekonomi yang sering mengkritik pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya terfokus pada pencapaian pertumbuhan ketimbang pemerataan. Dalam skala global penyebab kemiskinan secara umum dapat dinyatakan adanya ketidakadilan struktural global.

Tegegne dan Egziabher (2019) dalam penelitiannya "*Poverty and poverty reduction in Ethiopia*" studi pada Ethiopia menegaskan bahwa sebagai salah satu wilayah yang miskin di belahan dunia, dimensi kemiskinan ekonomi yang terjadi di wilayah Ethiopia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Di sisi lain Peter Sounders dalam penelitiannya *researching poverty, methods, results and impact* di wilayah Australia menyatakan bahwa penghasilan yang rendah merupakan salah satu alasan utama masyarakat terjebak dalam kemiskinan ekonomi. Minimnya pendapatan membuat masyarakat tidak mampu memperkuat ekonomi keluarganya.

Menurut Bank dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional vs ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak ada tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (Prihartini, 2006). Secara lebih terperinci kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan: (a). Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; (b) Penyebab keluarga, yang

menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; (c) Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; (d) Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; (e) Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Tema yang menyatu dalam karya Sen menitikberatkan pada penciptaan potensi atau kemampuan manusia, dan bagaimana kemampuan ini meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat dan keluarga. Ia telah melihat perkembangan kemampuan manusia sebagai tujuan riil dari pertumbuhan ekonomi dan alasan utama untuk menjadi seorang ahli ekonomi. Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial.

2.1.4 Indikator Kemiskinan

BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count index*) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Selain itu Badan Pusat Statistik juga menetapkan 14 variabel untuk menentukan keluarga/rumah tangga yang layak dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Karakteristik Rumah Tangga Sangat Miskin Menurut BPS

| No | Variabel kemiskinan | Karakteristik Kemiskinan |
|----|--|---|
| 1 | Luas bangunan tempat tinggal | Kurang dari 8 m ² per orang |
| 2 | jenis lantai tempat tinggal | Tanah bambu |
| 3 | Jenis dinding tempat tinggal | Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester |
| 4 | Fasilitas tempat buang air besar | Tidak ada, menumpang orang lain |
| 5 | Sumber penerangan rumah tangga | Bukan listrik |
| 6 | Sumber air minum | Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan |
| 7 | Bahan bakar untuk masak | Kayu bakar/arang/minyak tanah |
| 8 | Konsumsi daging/ayam/susu per minggu | Satu kali dalam seminggu |
| 9 | Pembelian pakaian baru anggota rumah tangga setiap tahun | Tidak pernah membeli/satu selama setahun |
| 10 | Frekuensi makan dalam sehari | Satu/dua kali dalam sehari |
| 11 | Kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas atau ke dokter | Tidak mampu membayar |
| 12 | Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga | Petani dengan luas lahan 500 m ² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan |
| 13 | Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga | Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD |
| 14 | Pemilikan asset/harta bergerak maupun tidak bergerak | Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya |

Sumber : BPS 2019

Dari beberapa variabel diatas, apabila sembilan diantaranya terdapat pada satu rumah tangga, maka rumah tangga tersebut dikategorikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang pada umumnya berlaku dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek *finansial* tetapi meliputi semua jenis kekayaan (*Wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Suharto (2006 : 148-149) mengatakan bahwa ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu : (1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial. (2) Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar. (3) Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering "*near poor*" (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status "rentan" menjadi "miskin" dan bahkan "*destitute*" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

2.1.6 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan

mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Karlsson yang dikutip Ala (1981) meliputi: (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; (2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan (3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat.

Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu: (1) perencanaan sebagai reformasi sosial (*social reform*), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman

pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat; (2) perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning by doing*), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*social mobilization*), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat model pembangunan. Model pembangunan I menitikberatkan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Model pembangunan II menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar. Model pembangunan III berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Sedangkan model pembangunan IV menitikberatkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah. Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Kemiskinan

Salah satu kekuatan yang dimiliki negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan adalah lewat kebijakan anggaran, yang mengatur sumber penerimaan dan kebijakan pengeluaran pemerintah. Penyusunan rencana, pelaksanaan serta pengawasan anggaran yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) seharusnya akan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang mampu menuju pembangunan yang lebih adil dan merata. Artinya Semakin besar APBN semakin merata pembangunan untuk seluruh rakyat.

Anggaran yang berpihak pada kaum miskin (*Pro Poor Budgeting*), dapat diterjemahkan sebagai praktek perencanaan dan penganggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat (Rinusu, 2006).

Dalam studi empiris terdahulu membuktikan adanya suatu relasi negatif (*trade off*) antara besaran pengeluaran pemerintah bidang belanja modal dan tingkat kemiskinan. Penelitian Marita dkk (2021), hasil dari penelitian Marita dkk menemukan bahwa besaran dari anggaran belanja modal akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Yustie dan Heriqbaldi (2014) di Jawa Timur menemukan bahwa pengeluaran pemerintah/belanja modal memiliki pengaruh signifikan dengan penurunan

kemiskinan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mehmood dkk (2010) bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang belanja pegawai dan tingkat kemiskinan memiliki korelasi negatif hal ini dibuktikan dengan banyaknya peneliti yang mengidentifikasi bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pada saat yang sama, akan meningkatkan stabilitas aktivitas ekonomi (Kemenkeu, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Henderson (1998) Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pengeluaran militer dikaitkan dengan kemiskinan di Amerika Serikat untuk periode 1959-1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengeluaran personel militer berkorelasi terbalik dengan kemiskinan, sementara pengeluaran Operasi dan Pemeliharaan (O&M), Pengadaan, dan Penelitian dan Pengembangan (R&D) berkorelasi langsung dengan kemiskinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2015) yang berjudul dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan pada sepuluh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana komponen fiskal pemerintah yakni belanja modal dan belanja pegawai berdampak pada penurunan angka kemiskinan di 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

2.2.2 Hubungan Investasi dan Kemiskinan

International monetary fund (2005) dalam laporan perekonomian Bangladesh menunjukkan bahwa investasi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kondisi perekonomian Bangladesh yang cenderung tidak mendukung peningkatan investasi seperti ketersediaan listrik dan gas yang terbatas, jaringan transportasi yang minim, jasa telekomunikasi kurang bagus, fasilitas bandara kurang bagus, korupsi dan

penegakan hukum lemah. Pemecahan masalah-masalah tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Langkah yang diambil oleh pemerintah Bangladesh adalah mengikuti konsep yang ada dalam *Millennium Development Goals (MDGs)* secara bertahap.

Dasar teori antara investasi dan kemiskinan, yakni teori yang digagas oleh seorang ekonom Nurkse (1953). Teori ini disebut “Lingkaran Setan Kemiskinan” (*Vicious Circle of Poverty*). Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang. Inti teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama untuk membentuk modal masyarakat.

Pola berulang itu terus terjadi dan untuk memutusnya dengan cara memberi modal kepada pelaku ekonomi. Namun demikian, negara berkembang kesulitan dalam mengalokasikan modal. Dari sisi *supply*, kurangnya tabungan adalah karena pendapatan rendah, tabungan yang rendah, investasi rendah menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah. Di sisi demand investasi yang rendah berarti modal rendah yang menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah pendapatan rendah dan kembali kepada investasi rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Saleh (2020), dengan judul penelitian *Effects of Capital Expenditure, Non-Capital Expenditure, Foreign Investment, and Domestic Investment on Poverty Rate in South Kalimantan Province*, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut besaran investasi (PMA dan PMDN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian terdahulu tentang investasi mereduksi tingkat kemiskinan dilakukan oleh Leasiwal (2021), dengan topik penelitian Determinan dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana investasi mampu menurunkan kemiskinan di maluku.

Melihat kondisi Provinsi Gorontalo, setidaknya ada lima alasan mendasar mengapa Provinsi Gorontalo membutuhkan investasi saat ini (Kurniawan, 2016): (a) Penyediaan lapangan kerja. (b) Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa. (c) Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. (d) Pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun Infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain. (e) Alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi.

Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut (Kurniawan, 2016):

(1) Investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru; (2) Investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan); (3) Investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang local untuk pembiayaan impor; (4) Pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini, sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan; (5) Sebagian besar negara-negara di dunia ketika

tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumberdayasumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi; (6) Para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan.

2.3 Kajian Empiris

| Penulis | Variabel | Metode | Hasil Analisis |
|-----------------------------|---|--|--|
| Hutabarat (2013) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belanja Pegawai ✚ Belanja barang ✚ Belanja modal ✚ Jumlah penduduk ✚ Pertumbuhan ekonomi | Data sekunder kuantitatif, penelitian sebab akibat (<i>causal research</i>). | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ✚ Belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ✚ Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan taraf signifikansi 90% ✚ Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan Pertumbuhan ekonomi |
| Habanabakize et al., (2019) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ upah riil, ✚ produktivitas tenaga kerja ✚ pengeluaran investasi ✚ tingkat penyerapan tenaga kerja | <i>model autoregressive distribution lag (ARDL), error correction model (ECM), dan analisis kausalitas Toda–Yamamoto pada data deret waktu triwulanan dari 1995 Q1 hingga 2019 Q1.</i> | ✚ upah riil berdampak negatif pada tingkat penyerapan tenaga kerja jangka panjang, analisis jangka pendek menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja yang lambat mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja saat ini. Selatan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja tampaknya menjadi prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. |
| Wahyudi (2020) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pengeluaran pemerintah bidang belanja pendidikan ✚ pengeluaran pemerintah bidang belanja kesehatan ✚ pengeluaran pemerintah bidang infrastuktur | pendekatan kuantitatif menggunakan metode eksplanasi | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ✚ pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di Indonesia |

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Akhmad (2015) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ belanja modal ✚ investasi swasta ✚ pertumbuhan ekonomi ✚ penyerapan tenaga kerja ✚ kemiskinan | menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. data <i>time series</i> tahun (2004- 2012) dan data cross section 10 kabupaten kota. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta ✚ Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan ✚ indeks pembangunan manusia (IPM), investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dalam menurunkan angka kemiskinan. |
| Afiat (2015) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ Struktur ekonomi | metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi, data sekunder hasil publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara periode 1994-2008. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara. |
| Campodonico (2014) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran publik bidang pendidikan ✚ Pengeluaran publik bidang kesehatan ✚ Pengeluaran publik bidang infrastruktur ✚ Pertumbuhan ekonomi ✚ kemiskinan | Model Kesetimbangan Umum Dinamis yang Dapat Dikomputasi (DCGEM). Data <i>time series</i> 20 tahun. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Ekonomi Peru telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir. Kebijakan perpajakan dan moneter yang baik, serta penyesuaian struktural yang komprehensif, yang telah menarik investasi asing yang cukup besar, dianggap sebagai penopang keberhasilan ini |
| Alamanda (2020) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belanja bantuan sosial ✚ Belanja subsidi ✚ Hibah ✚ Belanja infrastruktur ✚ Kemiskinan ✚ Ketimpangan pendapatan | <i>system fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE),</i> | <ul style="list-style-type: none"> ✚ belanja bantuan sosial, subsidi dan hibah memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (bila menggunakan model efek acak), dan daerah pedesaan (bila menggunakan model efek tetap). ✚ belanja infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di pedesaan daripada perkotaan. |
| Permadi (2018) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pertumbuhan ekonomi ✚ kemiskinan | metode dalam artikel ini, metode <i>Growth Incidence Curve (GIC)</i> , dan metode <i>Pro-Poor Growth Index</i> | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum berpihak pada penduduk miskin selama periode pengamatan. ✚ belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | (PPGI). <i>Time series</i> periode 2005-2013. metode GIC | memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. |
| Leasiwal (2021) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pertumbuhan ekonomi ✚ Investasi pemerintah ✚ Konsumsi pemerintah ✚ kemiskinan | metode regresi linier bertipe data panel | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Hasil regresi diketahui bahwa investasi pemerintah berpengaruh sangat positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,04 terhadap tingkat kemiskinan di Maluku sedangkan untuk variabel konsumsi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,03 terhadap kemiskinan. |
| Sari (2013) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan ✚ Kesehatan ✚ Subsidi kemiskinan | metode estimasi <i>Error Corection Model</i> (ECM) dan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS). | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sarannya pengguna subsidi di lapangan. |
| Nursini (2019) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ Pendapatan asli daerah ✚ Transfer antar pemerintah | model regresi data panel untuk 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2016. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pendapatan pemerintah daerah dan transfer antar pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan ✚ pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan |
| Rini & Sugiharti (2016) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ jenis kelamin ✚ usia ✚ jumlah anggota rumah tangga ✚ pekerjaan kepala rumah tangga ✚ akses terhadap kredit pendidikan kepala rumah tangga ✚ akses teknologi informasi dan komunikasi ✚ lokasi | model regresi logit. Analisis menggunakan data sekunder dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2012. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Berdasarkan pemetaan kemiskinan, provinsi dibagi menjadi empat kuadran dan analisis 2007 dan 2012 menunjukkan perubahan posisi kuadran beberapa provinsi. Ada provinsi yang membaik, yaitu Jawa Tengah dan Maluku, sedangkan Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan menunjukkan kondisi yang semakin buruk |
| Bakar (2019). | <ul style="list-style-type: none"> ✚ IPM ✚ PDRB ✚ Kemiskinan | <p>Metode analisis regresi linier berganda.</p> <p>Data sekunder yang diperoleh dari BPS Mimika Kabupaten melalui teknik dokumentasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✚ IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika ✚ PDRB negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika ✚ IPM dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika. |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Nursini (2020). | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pertumbuhan ekonomi ✚ Keterbukaan ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ Investasi ✚ kemiskinan | Data <i>time series</i> 1997-2018 | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. ✚ Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan |
| Djohan & Junaidi (2021) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Investasi ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ Pertumbuhan ekonomi ✚ Kemiskinan ✚ Pengeluaran pemerintah | Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>path analysis</i> (analisis jalur) dan data yang digunakan adalah <i>time series</i> dari tahun 2006-2019 | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan ✚ Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ✚ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan ✚ Investasi secara tidak langsung berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi ✚ pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi |
| Putri (2018) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ Belanja modal ✚ Kemiskinan ✚ Pertumbuhan ekonomi | <i>Path Analysis</i> untuk mengidentifikasi secara langsung dan tidak langsung | <ul style="list-style-type: none"> ✚ pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan hubungan arah yang berbeda dalam setiap variabel. ✚ pendekatan <i>Pro Poor Growth Index</i> (PPGI), hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. |
| Liu et al., (2020) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ kesehatan ✚ pendidikan ✚ jaminan sosial ✚ infrasturktur ✚ lingkungan hidup | Data time 2010-2016 perspektif ekonometrika spasial | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan infrastruktur semuanya menurunkan/mengentaskan angka kemiskinan |
| Olatunji et al., (2017) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belanja modal ✚ Layanan ekonomi ✚ Layanan sosial masyarakat ✚ Layanan administrasi | dianalisis dengan menggunakan Augmented Uji akar unit Dickey-Fuller, uji kointegrasi dan analisis model koreksi kesalahan (ECM). Data sekunder | <ul style="list-style-type: none"> ✚ belanja modal sangat erat dalam menjaga dan menopang ekonomi pertumbuhan di Nigeria |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Magdalena & Suhatman (2020) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah ✚ Investasi domestik ✚ Investasi asing ✚ Pertumbuhan ekonomi | <p>penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis mutiple linier regresi.</p> <p>data sekunder dengan deret waktu tahun 1990-2019</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengeluaran pemerintah, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor primer ✚ sementara secara parsial Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer sedangkan Domestik Investasi dan Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh signifikan. |
| Prasetyo (2015) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ belanja konsumsi pemerintah ✚ belanja investasi pemerintah ✚ investasi swasta | <p>Metode analisis menggunakan regresi data panel karena data berupa <i>cross section</i> dan <i>time series</i> dengan <i>Metode Fixed Effect Model</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ✚ realisasi investasi sektor swasta, memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan, realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif. |